

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Bappeda Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

Pencapaian Sasaran Strategis I :

Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi

Perencanaan pembangunan yang terintegrasi mengandung makna keseimbangan terhadap rencana pemanfaatan sumberdaya yang bermuara pada suatu tujuan yang sama yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan. Dalam hal ini, perencanaan yang terintegrasi terjadi apabila terdapat kesinambungan, keselarasan dan konsistensi setiap program-program pembangunan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis I disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2016

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi	Persentase SKPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan RPJMD	70%	83,01%	118,59
	Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	80%	97,15%	121,44
	Persentase dokumen RKPD dalam KUA PPAS	100%	100%	100

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Persentase dokumen KUAPPAS kedalam APBD	100%	96,20%	96,20

Sumber : Hasil Analisis Bappeda 2017

Realisasi dari indikator kinerja Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD dapat direalisasikan hanya sebesar 97,15 persen disebabkan karena dari total program yang ada di RPJMD Kota Bima 2013-2018 yaitu 307 program yang diakomodir atau ditindaklanjuti dalam RKPD tahun 2017 (RKPD Tahun 2017 penyusunannya dilakukan pada tahun 2016) sebanyak 316 program. Sedangkan untuk indikator penjabaran RKPD ke dalam KUA PPAS terealisasi 100 persen dimana 316 program yang ada dalam RKPD 2017 seluruhnya diakomodir dan sinkron dengan seluruh program yang ada dalam KUA PPAS 2016 yaitu 316 program juga. Adapun indikator penjabaran KUA PPAS ke dalam APBD yang mencapai 96,20 persen dikarenakan jumlah program dalam APBD sebanyak 304 program.

Tabel 3.2.
Evaluasi Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Tahun 2016

No	PROGRAM	RPJMD	RKPD	KUA/PPAS	APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN WAJIB				
	Pendidikan				
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	√	√	√	√
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√
3	Program peningkatan disiplin aparatur	√			√
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	√	√	√	√
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	√	√	√	√
7	Program pendidikan non formal	√	√	√	√
8	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	√	√	√	√
9	Program Pendidikan Menengah	√			
10	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	√	√	√	√
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	√	√	√	√

12	Program Penataan Peraturan perundang-undangan	√			
		12	9	9	10
	Kesehatan				
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
14	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
17	Program obat dan perbekalan kesehatan	√	√	√	√
18	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√
19	Program Pengawasan Obat dan Makanan	√	√	√	√
20	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	√	√	√	√
21	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.	√	√	√	√
22	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	√	√	√	√
23	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	√	√	√	√
24	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	√	√	√	√
25	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	√	√	√	√
26	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.	√	√	√	√
27	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	√	√	√	
28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	√	√	√	√
29	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	√	√	√	√
30	Program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan KB	√	√	√	√
		18	18	18	17
	Pekerjaan Umum				
31	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
32	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
33	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√			√
34	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√			√
35	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
36	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	√	√	√	√
37	Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	√	√	√	√
38	Program pembangunan Turap/Talud/Bronjong	√	√	√	√
39	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	√	√	√	√
40	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		√	√	√
41	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	√	√	√	√

42	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	√	√	√	√
43	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	√	√	√	√
44	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	√	√	√	√
		13	12	12	14
	Perumahan				
45	Program Pengembangan Perumahan	√	√	√	√
46	Program Lingkungan Sehat Perumahan		√	√	√
47	Program pemberdayaan komunitas perumahan	√	√	√	√
48	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	√	√	√	√
49	Program Perencanaan Permukiman Kumuh				
		3	4	4	4
	Penataan Ruang				
50	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
51	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
52	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
53	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√			√
54	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
55	Program Perencanaan Tata Ruang	√	√	√	√
56	Program Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√
57	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	√	√	√	√
		8	7	7	8
	Perencanaan Pembangunan				
58	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
59	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
60	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
61	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
62	Program Kerjasama Pembangunan	√	√	√	√
63	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	√	√	√	√
64	Program Pengembangan Data/Informasi	√	√	√	√
65	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√	√	√
66	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	√	√	√	√
67	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	√	√	√	√
68	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber daya alam	√	√	√	√
69	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	√			
70	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	√	√	√	√
		13	12	12	12
	Perhubungan				
71	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
72	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√

73	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√			√
74	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√			√
75	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
76	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	√	√	√	√
77	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	√	√	√	√
78	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	√	√	√	√
79	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	√	√	√	√
80	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan		√	√	√
81	Program Perhubungan Laut		√	√	
82	Program Peningkatan Pelayanan Jasa Terminal				√
		9	9	9	11
	Lingkungan Hidup				
83	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
84	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
85	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
86	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
87	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
88	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
89	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
90	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
91	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
92	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	√	√	√
93	Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	√	√	√	√
94	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	√	√	√	√
95	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	√	√	√	√
96	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	√	√	√	√
97	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	√			
98	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	√			
99	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	√	√	√	
100	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	√	√	√	√
101	Program Peningkatan Pelayanan Kebersihan	√	√	√	
102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan	√	√	√	√
103	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Persampahan		√	√	
		20	19	19	16
	Pertanahan				

109	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	√	√	√	√
110	Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan		√	√	√
111	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		√	√	
		1	3	3	2
	Kependudukan dan Catatan Sipil				
112	Program Penataan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
113	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√
114	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
115	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√
116	Program Penataan Administrasi Kependudukan	√	√	√	√
		5	5	5	5
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
117	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
118	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
119	Program peningkatan disiplin aparatur		√	√	√
120	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	
121	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	√	√	√	√
122	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	√	√	√	√
123	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	√	√	√	√
124	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak	√	√	√	√
125	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	√	√	√	√
		8	9	9	8
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
126	Program Keluarga Berencana	√	√	√	√
127	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	√	√	√	√
128	Program Pelayanan Kontrasepsi	√	√	√	√
129	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	√	√	√	√
130	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	√	√	√	√
131	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS	√	√	√	√
132	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	√	√	√	√
133	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	√	√	√	√
		8	8	8	8
	Sosial				
134	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
135	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
136	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	

137	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
138	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya	√	√	√	√
139	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√
140	Program Pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma	√	√	√	√
141	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	√	√	√	√
142	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√
		9	9	9	9
	Ketenagakerjaan				
143	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	√	√	√	√
144	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	√	√	√	√
145	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	√	√	√	√
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
146	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
147	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	√	√	√	√
148	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
149	Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	
150	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√
151	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	√	√	√	√
152	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	√	√	√	√
153	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	√	√	√	√
155	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	√	√	√	√
		9	9	9	8
	Kebudayaan				
156	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
157	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
158	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
159	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
160	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
161	Program Pengembangan Nilai Budaya	√	√	√	√
162	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	√	√	√	√
163	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	√	√	√	√
164	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	√	√	√	
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya				√

		9	9	9	9
	Kepemudaan dan Olahraga				
165	Program peningkatan peran serta kepemudaan	√	√	√	√
166	Program pembinaan dan pemasarakan olahraga	√	√	√	√
167	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	√	√	√	√
		3	3	3	3
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
168	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
169	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
170	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
171	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√			
172	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
173	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	√	√	√	√
174	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	√	√	√	
175	Program Pendidikan Politik masyarakat	√	√	√	√
		8	7	7	6
	POL PP				
176	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
177	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
178	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
179	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	√			√
180	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	√
181	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	√	√	√	√
182	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal	√	√	√	√
183	Program pengembangan wawasan kebangsaan	√			
184	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	√	√	√	√
185	Program Reformasi Birokrasi	√			
186	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	√	√	√	
		11	8	8	8
	5 KECAMATAN				
187	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√	√	√
		1	1	1	1
	38 KELURAHAN				
188	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√	√	√
		1	1	1	1
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian				

	SEKRETARIAT DAERAH				
189	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
190	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
191	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
192	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
193	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	√	√	√	√
195	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	√	√	√
196	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	√	√	√	√
197	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	√	√	√	√
198	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	√	√	√	
199	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√	√
200	Program Penataan Daerah Otonom Baru	√	√	√	√
201	Program Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	√	√	√	√
202	Program Administasi Kerjasama Pembangunan	√	√	√	
203	Program Peningkatan kapastitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	
204	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	√	√	√	√
205	Program Percepatan Reformasi Birokrasi		√	√	
206	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	
		16	17	17	12
	SEKRETARIAT DPRD				
207	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
208	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
209	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
210	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
211	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	√	√	√	√
212	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	√	√	√	√
		6	6	6	6
	INSPEKTORAT				
213	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
214	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
215	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
216	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√	√	√
217	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	√	√	√	√
218	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	√	√	√	√
219	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	√	√	√	√

220	Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	√	√	√	√
221	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	√	√	√	√
222	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi	√	√	√	
223	Program mengintensikan penanganan pengaduan masyarakat		√	√	√
		10	11	11	11
	5 KECAMATAN				
224	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
225	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
226	Program peningkatan disiplin aparatur	√			√
227	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
228	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	√	√	√	√
229	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	√	√	√	√
230	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan		√	√	√
		6	6	6	7
	38 KELURAHAN				
231	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	
232	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	
233	program peningkatan disiplin aparatur	√			
234	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	√	√	√	
235	Program Peningkatan Kinerja pengelolaan Persampahan	√			
236	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Perdesaan	√			√
237	program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	√	√	√	√
238	program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	√			
239	program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	√			
240	program pembinaan dan peningkatan pelayanan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	√	√	√	
241	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan		√	√	√
242	Program Peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Kelurahan		√	√	√
		10	7	7	4
	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
243	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
244	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
245	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√

246	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
247	Program Pendidikan Kedinasan	√	√	√	√
248	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√			√
249	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	√	√	√	√
		7	6	6	7
	DPPKAD				
250	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
251	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
252	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
253	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	
254	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
255	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	√	√	√	√
256	Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik DAerah	√	√	√	√
257	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	√	√	√	√
		8	8	8	7
	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU				
258	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		√	√	√
259	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		√	√	√
260	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		√	√	√
261	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		√	√	√
262	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		√	√	√
263	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	√			√
264	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				√
265	Program Aplikasi Perijinan Online				√
266	Program Rencana Umum Penanaman Modal				√
267	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan				√
		1	5	5	10
	BPBD				
268	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
269	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
270	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√
271	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√			
272	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
273	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		√	√	√
274	Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana				√
275	Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	√	√	√	√
276	Program Penanggulanga Bencana/Pencegahan Bencana				√
277	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana				√

278	Program Pengkajian Secara Cepat dan Tepat				√
279	Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar				√
280	Program Rehabilitasi				√
281	Program Rekonstruksi				√
282	Program Peringatan Dini				√
		6	6	6	14
	KETAHANAN PANGAN				
283	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
284	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
285	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		√	√	√
286	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	√
287	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
288	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		√	√	√
289	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	√	√	√	√
290	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	√	√	√	√
291	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		√	√	
292	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	√	√	√	
		7	10	10	8
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
293	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	
294	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	
295	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	
296	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√			
297	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	
298	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	√	√	√	
299	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	√	√	√	
300	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	√	√	√	
301	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	√	√	√	
302	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	√	√	√	
303	Program Peningkatan Sarana/Prasarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	√	√	√	
304	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	√	√	√	
		12	11	11	
	Komunikasi dan Informatika				
305	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
306	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
307	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√	√	√

308	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√			√
309	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
310	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	√	√	√	√
311	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		√	√	√
312	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa		√	√	√
313	Program Pengadaan Perangkat Aplikasi dan Telematika				√
314	Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah				√
315	Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika				√
316	Program Pembinaan Dan Pengawasan Sumberdaya Postel				√
		6	7	7	12
	Perpustakaan				
317	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		√	√	√
318	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		√	√	√
319	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		√	√	√
320	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur		√	√	√
321	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		√	√	√
322	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		√	√	√
323	Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi Kearsipan		√	√	√
324	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan		√	√	√
325	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	√	√	√	√
		1	9	9	9
	STATISTIK				
326	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		√	√	√
327	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		√	√	√
328	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		√	√	√
329	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur		√	√	√
330	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		√	√	√
331	Program Pengembangan Statistik Daerah				√
332	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	√	√	√	√
		1	6	6	7
	URUSAN PILIHAN				
	Pertanian				
333	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
334	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
335	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
336	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	√

337	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
338	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	√	√	√	√
339	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		√	√	√
340	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	√			√
341	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	√			√
342	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	√			√
343	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				√
344	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	√			√
345	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	√	√	√	√
346	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	√	√	√	√
		12	9	9	14
	Kehutanan				
347	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	
348	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	
349	Program peningkatan disiplin aparatur	√			
350	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	
351	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	
352	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	√	√	√	
353	Program rehabilitasi hutan dan lahan	√	√	√	
354	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	√	√	√	
355	Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan	√	√	√	
356	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan		√	√	
357	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		√	√	
358	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		√	√	
359	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		√	√	
		9	12	12	0
	PARIWISATA				
360	Program Pemasaran Pariwisata	√	√	√	√
361	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	√	√	√	√
362	Program Pengembangan Kemitraan	√	√	√	
363	Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata				√
364	Program Pengembangan SDM Kepariwisata				√
365	Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata				√
		3	3	3	5

	Kelautan Perikanan				
366	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√	√	√
367	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√	√	√
368	Program peningkatan disiplin aparatur	√	√	√	√
369	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	√
370	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√
371	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	√	√	√	√
372	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	√	√	√	
373	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	√	√	√	
374	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	√	√	√	√
375	Program pengembangan budidaya perikanan	√	√	√	√
376	Program pengembangan perikanan tangkap	√	√	√	√
377	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	√	√	√	√
378	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	√	√	√	√
379	Program Pengembangan Lingkungan Wilayah Peisisir		√	√	
		13	14	14	11
	Perdagangan				
380	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	√	√	√	√
381	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	√	√	√	√
382	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	√	√	√	
		3	3	3	2
	Perindustrian				
383	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	√	√	√	√
384	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	√	√	√	√
385	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	√	√	√	√
386	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	√	√	√	√
		4	4	4	4
	Ketransmigrasian				
387	Program Transmigrasi Lokal	√	√	√	
		1	1	1	0
	Total	307	316	316	304
	Persentase (%)		97,15	100	96,20

Sumber : Hasil Analisis Bappeda 2017

Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis I pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2016 Bappeda Kota Bima mengalami peningkatan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda
dalam Pencapaian Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase SKPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan RPJMD	60%	58,43%	97,38	70%	83,01%	118,59
Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	80%	88,66%	110,83	80%	97,15%	121,44
Persentase dokumen RKPD dalam KUA PPAS	80%	100%	125	100%	100%	100
Persentase dokumen KUAPPAS kedalam APBD	100%	80,43%	80,43	100%	96,20%	96,20
Rata-rata			103,41			109,06

Sumber : Hasil Analisis Bappeda 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja empat indikator sasaran strategis I menunjukkan bahwa pada tahun 2015 memiliki rata-rata capain 103,42% sedangkan di tahun 2016 menunjukkan peningkatan capaian sampai dengan 109,06% atau dengan tingkat kenaikan 5,45%.

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Bappeda tahun 2013-2018 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4.
Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis I terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi sampai tahun 2016	% Capaian
Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi	Persentase SKPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan RPJMD	100%	83,01%	83,01%

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi sampai tahun 2016	% Capaian
	Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	100%	97,15%	97,15%
	Persentase dokumen RKPD dalam KUA PPAS	100%	100%	100%
	Persentase dokumen KUAPPAS ke dalam APBD	100%	96,20%	96,20%

Sumber: Hasil Analisa Bappeda, 2017

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I tersebut, selama tahun 2016, Bappeda Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5.
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi	• Penyusunan rancangan RKPD	124,450,000.00
	• Penyelenggaraan musrenbang RKPD	304,799,000.00
	• Penetapan RKPD	97,310,000.00
	• Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	136,835,000.00
	• Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	158,079,591.00
	• Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	193,630,500.00
	• Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	90,100,000.00
	• Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	125,101,000.00
	• Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	347,225,000.00
	• Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	655,881,920.00
	• Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Prasarana dan SDA	331,700,513.00

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
	• Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD)	99,292,250,00
	• Koordinasi Perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi	224.180.000,00
	• Updating/Pembaruan Data Capaian Kinerja RPJMD	63,775,000.00
	• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42,390,000.00
	• Penyusunan laporan keuangan semesteran	24,747,000.00
	• Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	26,377,500.00
	• Penyusunan Rencana Kerja/RKA/DPA/DPPA SKPD	78,240,000.00

Sumber: Dokumen Penetapan Kinerja Bappeda 2016

Pencapaian Sasaran Strategis II

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pada sektor strategis dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses penyusunan dan muatan dari setiap dokumen perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah serta dokumen laporan kinerja pada sektor-sektor strategis disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, dokumen-dokumen ssektor strategis yang tersedia dimanfaatkan dan menjadikan masukan dalam penyusunan anggaran. Ketersediaan dokumen perencanaan sektor strategis mutlak diperlukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan sumber anggaran APBN dan APBD Provinsi. Adapun target kinerja dan realisasi untuk pengukuran kinerja sasaran strategis II tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis II Tahun 2016

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis	Persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PerPres 29/2014, Tahun PermenPAN 53/2014, Permendagri 54/2010)	75%	80,61%	107,48%

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Persentase dokumen perencanaan strategis SKPD dalam RKPD	50%	45%	90%

Sumber: Hasil Analisa Bappeda, 2017

Capaian kinerja pada indikator Persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 107,48%. Dan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya maka capaian kinerja tahun 2016 mengalami peningkatan dengan tingkat kenaikan sebesar 25,38% dimana capaian kinerja pada indikator kinerja sasaran yang sama pada tahun 2015 hanya mencapai 64,29%.

Adapun data pendukung capaian kinerja pada indikator persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2016 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7.
Ketersediaan Dokumen SKPD sesuai Ketentuan yang berlaku

No	SKPD	Dokumen Perencanaan sesuai Permendagri No.54/2010		Dokumen sesuai PerPres No. 29/2014 dan PermenPAN&RB No.53/2014				
		Renstra SKPD	Renja SKPD	PK	IKU	RKT	RENAKSI	MONEV
1	DINAS DIKPORA	√	√	√	√	√	√	√
2	DIKES	√	√	√	√	√	√	×
3	DINAS PUTAMBEN	√	√	√	√	√	×	×
4	DTKP	√	√	√	√	√	×	×
5	BAPPEDA	√	√	√	√	√	√	√
6	DISHUBKOMINFO	×	√	√	√	√	×	×
7	BLH	√	√	√	√	√	×	×
8	DKPP	√	√	√	√	√	√	×
9	DISDUKCAPIL	√	√	√	√	√	√	×
10	BPPKB	×	√	√	√	√	×	×
11	DINSOSNAKERTRANS	√	√	√	√	√	√	×
12	DISKOPERINDAG	√	√	√	√	√	√	×
13	DISBUPAR	×	√	√	√	√	×	×
14	BAKESBANGPOL	√	√	√	√	√	√	×
15	SAT POL PP	×	√	√	√	√	×	×
16	SETDA	√	√	√	√	√	×	×
17	SETWAN	√	√	√	√	√	×	×
18	INSPEKTORAT	√	√	√	√	√	√	√
19	BKD	×	√	√	√	√	√	×

20	DPPKAD	√	√	√	√	√	√	√
21	KPPT	√	√	√	√	√	√	√
22	BPBD	√	√	√	√	√	√	×
23	BKPP	√	√	√	√	√	√	×
24	BPMPK	√	√	√	√	√	√	×
25	KPPT	√	√	√	√	√	√	×
26	DISPERTAPA	√	√	√	√	√	√	×
27	DISKANLUT	√	√	√	√	√	√	√
28	DISHUTBUN	×	√	√	√	√	×	×
JUMLAH		22	28	28	28	28	18	6
PERSENTASE (%)		78,57	100	100	100	100	64,29	21,43
RATA-RATA (%)								80,61

Sumber: Hasil Analisa Bappeda, 2017

Berkaitan dengan capaian kinerja pada indikator persentase dokumen perencanaan strategis SKPD dalam RKPD pada tahun 2016 baru tercapai hanya sebesar 45% dari target 50% dengan tingkat realisasi capaian sebesar 90%. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan bahwa dari 10 (sepuluh) dokumen perencanaan sektor strategis yang ada hanya baru 9 (Sembilan) dokumen yang program dan kegiatannya akomodir dalam RKPD Kota Bima.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target kinerja sampai akhir tahun perencanaan Renstra Bappeda, maka capaian kerjanya sudah mencapai 25 dokumen (8 dokumen realisasi tahun 2014,8 dokumen hasil realisasi tahun 2015 serta 9 dokumen hasil realisasi tahun 2016) atau dengan tingkat capaian 59,52 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel3.8.

Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis II terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi sampai tahun 2016	% Capaian
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis	Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan sektor strategis	42 Dokumen	25Dokumen	59,52%
	Persentase dokumen perencanaan strategis SKPD dalam RKPD	60%	45%	75%

Pencapaian sasaran strategis II tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9.
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II		Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis II	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya perencanaan pembangunan strategis	kualitas sektor	• Penyusunan Profil Daerah	42.810.000,00
		• Percepatan Implementasi PERDA tentang Bangunan/Gedung	50.000.000,00
		• Pengembangan Ekonomi Lokal	117.475.000,00
		• Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	68.200.000,00
		• Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya	51.865.000,00
		• Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	224.180.000,00
		• Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	59.345.000,00
		• Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	158,079,591.00
		• Koordinasi Program NUSP - Phase 2	137,445,509,00
		• Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	347,225,000.00
		• Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	655,881,920.00
		• Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Prasarana dan SDA	331,700,513.00

Sumber : Dokumen Penetapan Kinerja Bappeda 2016

Pencapaian Sasaran Strategis III :

Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat

Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2014

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, Pemerintah Daerah perlu mengumpulkan dan mengisi data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Hal ini dipertegas oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 274 yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam system informasi pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Bappeda Kota Bima menetapkan Sasaran Strategis III berupa tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat.

Adapun hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis III sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel3.10.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis III Tahun 2016

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	Persentase keterisian elemen data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 8 Tahun 2014	60%	56,47%	94,11%
	Persentase peningkatan keterisian SIPD oleh SKPD	40%	48%	120%

Sumber: Hasil Analisa Bappeda 2017

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja tahun 2016 dan pencapaian kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel3.11.
Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda dalam Pencapaian Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian

Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keterisian elemen data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 8 Tahun 2014	55%	56,65%	103%	60%	56,47%	94,11%
Persentase peningkatan keterisian SIPD oleh SKPD	30%	10%	33,33%	40%	48%	120%

Sumber: Hasil Analisis Bappeda 2017

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis III pada tahun 2016 mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya penambahan elemen data baru dalam aplikasi, sementara pada sisi lain banyak elemen data yang sudah sebelumnya juga tidak bisa dipenuhi oleh Kota Bima karena elemen data tersebut tidak ada dan tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan dan urusan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima. Sedangkan untuk indikator keterisian SIPD oleh SKPD mengalami kenaikan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2015 tingkat capaian kerjanya hanya sebesar 33,33% dan pada tahun 2016 naik menjadi 120%.

Target jangka menengah dalam upaya meningkatkan ketersediaan data/informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah periode 2014-2018 telah menetapkan bahwa pada akhir tahun 2018, pencapaian kinerja keterisian elemen data SIPD setidaknya mencapai 80%. Hal ini berarti bahwa pada tahun ketika perencanaan jangka menengah (tahun 2016), Bappeda Kota Bima telah berhasil merealisasikan 70,58% (tujuh puluh koma lima puluh delapan) dari target jangka menengah untuk indikator kinerja keterisian SIPD. Sedangkan untuk indikator keterisian oleh SKPD sampai tahun ketiga RPJMD atau tahun 2016 telah mencapai 80%.

Tabel 3.12.

Realisasi Kinerja Pencapaian sasaran Strategis III terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi Tahun 2016	% Capaian

Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2018)	Realisasi Tahun 2016	% Capaian
Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	Persentase keterisian elemen data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 8 Tahun 2014	80%	56,47%	70,58%
	Persentase peningkatan keterisian SIPD oleh SKPD	60%	48%	80%

Sumber: Hasil Analisis Bappeda 2017

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis III tersebut, telah dilaksanakan 8 (delapan) kegiatan pokok sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel3.13.
Program/Kegiatan pokok yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III	Program/ Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis III	Jumlah Anggaran (Rp.)
Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	• Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	40.975.000,00
	• Penyusunan profil daerah	42.810.000,00
	• Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	68.200.000,00
	• Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	59.345.000,00
	• Pengendalian penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	90.100.000,00
	• Updating/pembaruan data capaian kinerja RPJMD	67.525.000,00
	• Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	158.079.591,00

Sumber : Dokumen Penetapan Kinerja BAPPEDA 2016

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk ketiga sasaran strategis Bappeda Kota Bima tersebut diatas, maka dapat diperoleh rata-rata kinerja yang diperoleh dari rata-rata akumulasi capaian setiap indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis seperti sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Rata-rata Capaian Kinerja untuk keseluruhan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Bappeda Kota Bima Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi	Persentase SKPD yang dokumen perencanaannya selaras dengan RPJMD	70%	83,01%	118,59
		Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	80%	97,15%	121,44
		Persentase dokumen RKPD dalam KUA PPAS	100%	100%	100
		Persentase dokumen KUAPPAS kedalam APBD	100%	96,20%	96,20
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis	Persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PerPres 29/2014, Tahun PermenPAN 53/2014, Permendagri 54/2010)	75%	80,61%	107,48%
		Persentase dokumen perencanaan strategis SKPD dalam RKPD	50%	45%	90%
3.	Meningkatnya system data dan informasi pembangunan	Persentase keterisian elemen data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 8 Tahun 2014.	60%	56,47%	94,11%
		Persentase peningkatan keterisian SIPD oleh SKPD	40%	48%	120%
Rata-rata Capaian Kinerja					105,98%

Sumber: Hasil Analisis Bappeda 2017

Pengukuran kinerja tersebut diatas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan Bappeda Kota Bima. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun berkenaan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Bima sehingga tergambar capaian target jangka menengah sampai tahun 2016.

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain : (1) tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup dan memadai; (2) tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan (3) tersedianya anggaran yang cukup.

Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2016, keadaan pegawai pada BAPPEDA Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15.
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
2.	S2	12	26,09%
3.	S1	29	63,04%
4.	Diploma 3	1	2,17%
5.	SMA / sederajat	4	8,70%
Total		46	100%

Sumber : Bappeda Kota Bima Tahun 2017

Tabel3.16.
Jumlah pegawai berdasarkan golongan

	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	3	6,52%
2.	Golongan III	40	86,96%
3.	Golongan II	3	6,52%
4.	Golongan I	-	-
Total		46	100%

Sumber : Bappeda Kota Bima Tahun 2017

Tabel3.17.
Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	2,18%
2.	Eselon III	6	13,04%
3.	Eselon IV	13	28,26%
4.	Non-Eselonering	26	56,52%
Total		46	100%

Sumber : Bappeda Kota Bima Tahun 2017

Berdasarkan profil SDM aparatur diatas diketahui bahwa pegawai BAPPEDA Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 29 orang (63,04%) adalah Sarjana S-1, selanjutnya 12 orang (26,09%) memiliki tingkat pendidikan S-2, dan lainnya berpendidikan D.III dan SMA/ sederajat. Selanjutnya, berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai BAPPEDA Kota Bima (86,96%) atau 40 orang adalah Golongan III, 3 orang (6,52%) Golongan IV, dan sisanya 3 orang adalah pegawai golongan II.

Walaupun berdasarkan jenjang pendidikan, golongan dan pangkat, sebagian besar aparatur BAPPEDA Kota Bima cukup memadai, namun mengingat tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan cenderung kompleks, maka masih dibutuhkan peningkatan keterampilan khusus perencana guna meningkatkan sumber daya aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak yang relevan.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran seluruh kegiatan BAPPEDA Kota Bima tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 8.533.711.517,89 dan terealisasi sebesar Rp 8.366.375.483,00 atau sebesar 98,04%. Anggaran ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dari target belanja operasi sebesar Rp 8.327.971.517,89, BAPPEDA Kota Bima merealisasikan sebesar Rp 8.165.054.483,00 atau sebesar 98,04%. Adapun belanja modal, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 205.740.000,00, direalisasikan sebesar Rp 201.321.000,00 atau sebesar 97,85%.

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.18.
Rekapitulasi Belanja BAPPEDA Kota Bima Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Operasi	8.327.971.517,89	8.165.054.483,00	98,04
2	Belanja Modal	205.740.000,00	201.321.000,00	97,85
Jumlah		8.533.711.517,89	8.366.375.483,00	98,04

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan BAPPEDA Tahun 2016

3.2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2016, BAPPEDA Kota Bima melaksanakan 10 (sepuluh) Program Utama dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan utama. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19.
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung
Pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Kota Bima Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target(Rp.)	Realisasi(Rp.)	%
1.	Terwujudnya perencanaan yang terintegrasi	Penyusunan rancangan RKPD	124,450,000.00	124,450,000.00	100,00
		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	304,799,000.00	304,625,524.00	99,94
		Penetapan RKPD	97,310,000.00	97,310,000.00	100,00
		Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	136,835,000.00	136,835,000.00	100,00
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	158,079,591.00	157,168,591.00	99,42
		Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	193,630,500.00	191,846,500.00	99,08
		Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	90,100,000.00	90,005,460.00	99,89
		Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	125,101,000.00	124,828,900.00	99,78
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	347,225,000.00	346,600,000.00	99,82
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	655,881,920.00	654,932,220.00	99,86
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Prasarana dan SDA	331,700,513.00	330,581,313.00	99,66
		Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD)	99,292,250,00	99,292,250,00	100,00
		Koordinasi Perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi	224.180.000,00	85.985.000,00	38,36
		Updating/Pembaruan Data Capaian Kinerja RPJMD	63,775,000.00	63,633,400.00	99,78
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42,390,000.00	42,390,000.00	100,00
		Penyusunan laporan keuangan semesteran	24,747,000.00	24,747,000.00	100,00
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	26,377,500.00	26,377,500.00	100,00
Penyusunan Rencana Kerja/RKA/DPA/DPPA SKPD	78,240,000.00	78,240,000.00	100,00		
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sektor strategis	Penyusunan Profil Daerah	42.810.000,00	42.810.000,00	100,00
		Percepatan Implementasi PERDA tentang Bangunan/Gedung	50.000.000,00	49.670.600,00	99,34
		Pengembangan Ekonomi Lokal	117.475.000,00	117.200.000,00	99,77
		Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	68.200.000,00	68.089.968,00	99,84
		Koordinasi Review Rencana Program	51.865.000,00	51.865.000,00	100,00

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target(Rp.)	Realisasi(Rp.)	%
		dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya			
		Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	224.180.000,00	95.985.000,00	38,35
		Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	59.345.000,00	59.345.000,00	100,00
		Koordinasi Program NUSP - Phase 2	137,445,509,00	137,445,509,00	100,00
3.	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	40.975.000,00	40.239.000,00	98,20
		Penyusunan profil daerah	42.810.000,00	42.810.000,00	100,00
		Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	68.200.000,00	68.089.968,00	99,84
		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	59.345.000,00	59.345.000,00	100,00
		Pengendalian penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	90.100.000,00	90.005.460,00	99,90
		Updating/pembaruan data capaian kinerja RPJMD	63,775,000.00	63,633,400.00	99,78
		Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	158.079.591,00	157.168.591,00	99,42
			2,864,417,024.00	2,858,204,808.00	99.78

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan BAPPEDA 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 2016, pagu anggaran pelaksanaan program/kegiatan utama pada Bappeda Kota Bima adalah sebesar Rp 2.864.417.024,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.858.204.808,00 atau sebesar 99,78%.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, BAPPEDA Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.20.
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin
BAPPEDA Kota Bima Tahun 2016

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat (caraka/petugas pengantar surat)	40.050.000,00	39.100.000,00	97,63
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)	40.800.000,00	40.578.440,00	99,46
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, STNK dan BPKB)	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00
		Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi keuangan)	41.400.000,00	41.400.000,00	100,00

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Jasa Tukang)	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	95.123.700,00	95.123.700,00	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.950.000,00	60.950.000,00	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	21.797.000,00	21.797.000,00	100,00
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22.700.000,00	22.550.000,00	99,34
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000,00	29.890.000,00	99,63
		Penyediaan makanan dan minuman	91.200.000,00	91.200.000,00	100,00
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	794.312.431,00	794.303.099,00	99,99
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	24.575.000,00	24.575.000,00	100,00
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	43.740.000,00	43.740.000,00	100,00
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.545.000,00	50.105.000,00	99,13
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	83.000.000,00	83.000.000,00	100,00
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	135.302.000,00	135.302.000,00	100,00
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	15.750.000,00	15.592.900,00	99,00

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 2016